

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	2

### 1. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kedatangan	16 April 2018	Samarinda – Balikpapan (darat) - Tarakan
Pertemuan Pembukaan	16 April 2018 Kantor Jl. Slamet Riyadi RT 03 No.50 Tarakan	Dilaksanakan di Kantor PT Persada Kencana Prima dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Melakukan pertemuan pembukaan dengan MR PT Persada Kencana Prima didampingi personil terkait dan menyampaikan perkenalan Tim Audit, maksud dan tujuan audit, ruang lingkup audit, uraian rinci kegiatan audit, standar audit yang digunakan, dan komitmen menjaga kerahasiaan. b. Pertemuan Pembukaan dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16 - 17 April 2018 Kantor dan Lokasi IPK pada areal HGU di Desa Menjulutung, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung	a. Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan/uji petik lapangan. b. Melakukan analisis kesesuaian data terverifikasi terhadap prinsip dan kriteria standar VLK sesuai L.2.4 Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
Pertemuan Penutupan	18 April 2018 Kantor Jl. Slamet Riyadi RT 03 No.50 Tarakan	Dilaksanakan di Kantor PT Persada Kencana Prima dan dihadiri oleh personil seperti BAP dan daftar hadir terlampir. a. Menyampaikan laporan hasil audit dan mengkonfirmasi persetujuannya, meliputi temuan kesesuaian, temuan ketidaksesuaian, jangka waktu pemenuhan tindakan perbaikan, dan observasi. b. Pertemuan Penutupan. dibuatkan Berita Acara dan Daftar Hadir

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Perjalanan Kepulangan	19 April 2018	Tarakan – Balikpapan (pesawat) – Samarinda (darat)
Pengambilan Keputusan Sertifikasi Legalitas Kayu	Samarinda, 3 Mei 2018	a. PT Persada Kencana Prima mampu memenuhi persyaratan legalitas kayu sesuai standar VLK Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. b. Kepada PT Persada Kencana Prima dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	4

## 2. RESUME HASIL AUDIT SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU

**A. PRINSIP 1** : Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu.

**KRITERIA 1.1** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan


**1. Indikator 1.1.1** : Pelaku usaha memiliki izin lainnya yang sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
1	<b>1.1.1.a</b> ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal Izin Pinjam Pakai.
2	<b>1.1.1.b</b> Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal Izin Pinjam Pakai.

**KRITERIA 1.2** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR).

**2. Indikator 1.2.1.** : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
3	<b>1.2.1.a</b> Izin HTHR	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal HTHR
4	<b>1.2.1.b</b> Peta Lampiran HTHR	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal HTHR

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	5

**KRITERIA 1.3** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan

**3. Indikator 1.3.1.** : Pelaku usaha IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
5	<b>1.3.1.a</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
6	<b>1.3.1.b</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
7	<b>1.3.1.c</b> IPK pada areal yang dilepaskan	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
8	<b>1.3.1.d</b> Peta lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.
9	<b>1.3.1.e</b> Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU bukan Pada Areal kawasan hutan yang dilepas.

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	6

**4. Indikator 1.3.2.** : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
10	<b>1.3.2.a</b> IPK pada areal yang dilepaskan	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU untuk perkebunan kelapa sawit bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi
11	<b>1.3.2.b</b> Peta Lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU untuk perkebunan kelapa sawit bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi

**KRITERIA 1.4** : Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)

**5. Indikator 1.4.1.** : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
12	<b>1.4.1.a</b> Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	<b>M</b>	<p>Terdapat dokumen rencana pemanfaatan kayu pada areal HGU berupa Bagan Kerja Rencana Penebangan untuk Pemanfaatan Kayu Pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT. PKP Tahun 2018 seluas 850 Ha.</p> <p>Dimana pada Bagan Kerja tersebut terdapat kelengkapan dokumen rencana IPK sesuai dengan izin lokasi HGU yang diberikan, dokumen tersebut sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Berita Acara Pelaksanaan Pelaksanaan Timber Cruising Blok I pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT PKP dan Rekapitulasi LHC Blok I seluas 400 Ha;</li> <li>Berita Acara Pelaksanaan Pelaksanaan Timber Cruising Blok II pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT PKP dan Rekapitulasi LHC Blok II seluas 450 Ha;</li> <li>Rekapitulasi LHC Gabungan Blok I dan Blok II (850 Ha) yang dibuat Ganis PHPL-Canhut;</li> </ol>




Trustindo Certification

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU


No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	7

			<p>4. Pakta Integritas yang dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut yang melaksanakan Timber Cruising pada Blok I dan Blok II yaitu Didin Aminudin (No.Reg.02051-13/CANHUT/XX/2016) dan diketahui oleh Manager Logging (Hj.Rugayah,SH);</p> <p>5. Peta Hasil Penataan Areal Kerja Blok I dan Blok II Rencana Pemanfaatan Kayu Pada Areal HGU PT. PKP Skala 1 : 50.000 dan Rekapitulasi Panjang Trayek Pengukuran Batas Blok I dan Blok II dibuat oleh Ganis PHPL-Canhut;</p> <p>6. Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 30/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT PKP;</p> <p>7. Sertifikat HGU Nomor : 16.14.00.00.00200 seluas 6.800,51 Ha dan lampiran Peta Bidang Tanah Skala 1 : 100.000</p> <p>8. Bukti Penerimaan Negara/Bukti Setor PSDH/DR sebesar 25 % dari potensi sesuai LHC Blok I dan Blok II (850 Ha) yang dikalikan Faktor Eksploitasi (0,7), sesuai dengan Surat BPHP Wilayah XI Samarinda tentang Volume dan Tarif Sebagai Dasar Nomor S.96/BPHP-X-3/2018 tanggal 6 Februari 2018 Pembayaran PSDH dan DR sebesar 25% An. PT.PKP</p> <p>Berdasarkan hasil survey potensi Blok I dan Blok II seluas 850 Ha maka diketahui potensi kayu alam yang akan dimanfaatkan oleh PT PKP yang berada di areal HGU yang dipersiapkan untuk perkebunan kelapa sawit sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Blok</th> <th rowspan="2">Luas (Ha)</th> <th colspan="3">Volume Per Kelompok Jenis Kayu (M3)</th> </tr> <tr> <th>Meranti</th> <th>R Campuran</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>400</td> <td>2.111,61</td> <td>6.168,79</td> <td>8.280,40</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>450</td> <td>3.034,85</td> <td>6.394,68</td> <td>9.429,53</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>850</td> <td>5.146,46</td> <td>12.563,47</td> <td>17.709,93</td> </tr> </tbody> </table>	Blok	Luas (Ha)	Volume Per Kelompok Jenis Kayu (M3)			Meranti	R Campuran	Total	I	400	2.111,61	6.168,79	8.280,40	II	450	3.034,85	6.394,68	9.429,53	Total	850	5.146,46	12.563,47	17.709,93
Blok	Luas (Ha)	Volume Per Kelompok Jenis Kayu (M3)																								
		Meranti	R Campuran	Total																						
I	400	2.111,61	6.168,79	8.280,40																						
II	450	3.034,85	6.394,68	9.429,53																						
Total	850	5.146,46	12.563,47	17.709,93																						
13	<b>1.4.1.b</b>	<b>M</b>	Dokumen izin usaha atas nama PT Persada Kencana Prima (PT PKP) telah memenuhi persyaratan sebagai																							

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	8

	Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)		berikut : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat SK.Bupati Tana Tidung No.525.26/221/K-VIII/2012 tanggal 02 Agustus 2012 tentang Pemberian Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas ± 11.837 Ha di Kec.Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung dilampiri Peta Skala 1 : 100.000;</li> <li>2. Terdapat SK. Bupati Tana Tidung No.525/217/K-VIII/2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Izin Lingkungan atas Rencana Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 2.754 Ha di Desa Menjelutung, Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung;</li> <li>3. Terdapat SK. Tana Tidung No.525.26/256/K-X/2013 tanggal 16 Oktober 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) Menjadi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Kelapa Sawit Kepada PT PKP seluas ± 11.380 Ha dilampiri Peta Skala 1 :100.000;</li> <li>4. Terdapat SK. Kepala BPN RI No. 30/HGU/KEM-ATR/BPN/2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pemberian HGU atas nama PT PKP di Desa Menjelutung, Kec. Sesayap Hilir, Kab Tana Tidung Prov.Kalimantan Utara seluas 6.928,69 Ha; yang terdiri 2 (dua) nomor sertifikat HGU yaitu : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. NIB. 16.06.00.00.00200 seluas 6.860,51 Ha;</li> <li>b. NIB. 16.08.00.00.00201 seluas 68,18 Ha;</li> </ol> </li> </ol>
14	<b>1.4.1.c</b> Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Izin usaha non kehutanan (perkebunan kelapa sawit) atas nama PT. PKP sama dengan pemegang IPK pada HGU perkebunan kelapa sawit.
15	<b>1.4.1.d</b> IPK pada APL	<b>M</b>	Pada Surat Keputusan Kepala BPN tentang Pemberian HGU kepada PT PKP telah mencantumkan poin pertimbangan yaitu pemberian HGU atas nama PT. PKP berdasarkan surat BPKH Wilayah IV, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kemeterian Kehutanan tanggal 20 Januari 2016 Nomor : S.17/BPKH.IV-2/2016 dinyatakan




 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	9

			<p>areal Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT PKP seluas ± 11.837,74 Ha seluruhnya berada di luar kawasan hutan (Areal Penggunaan Lain)</p> <p>Berdasarkan telaahan diatas maka dapat dipastikan bahwa lokasi IPK atan nama PT Persada Kencana Prima (PT PKP) pada awalnya adalah APL yang yang memiliki potensi kayu alam sebelum berubah statusnya menjadi HGU yang diberikan kepada PT PKP sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p>
16	<b>1.4.1.e</b> Peta lampiran IPK	<b>M</b>	<p>Berdasarkan hasil verifikasi dokumen diketahui bahwa lokasi IPK pada areal HGU PT PKP yang terdiri dari Blok I seluas 400 Ha dan Blok II seluas ± 450 Ha berada pada Peta Bidang Tanah /Sertifikat HGU atas nama PT PKP yaitu sertifikat HGU dengan NIB. 16.06.00.00.00200 seluas 6.860,51 Ha</p> <p>Dan hasil observasi lapangan maka diketahui bahwa lokasi IPK pada areal HGU PT PKP sesuai Peta Bidang Tanah dengan koordinat sebagai berikut :</p> <p><b>Blok I :</b></p> <p>Koordinat pal/titik A : N. 03° 43' 38,6" ; E 117° 06' 03,5"</p> <p>Koordinat pal/titik B : N. 03° 43' 39,2" ; E 117° 05' 31,8"</p> <p>Lokasi Blok II berjarak 1 KM dari Blok I dan terletak didalam areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT PKP atau sesuai dengan Peta Bidang Tanah dengan sertifikat NIB. NIB. 16.06.00.00.00200.</p>

**6. Indikator 1.4.2.** : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
17	<b>1.4.2.a</b> IPK pada APL	<b>NA</b>	<p>Alasan tidak diverifikasi :</p> <p>Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU untuk perkebunan kelapa sawit bukan</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	10


			Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi
18	<b>1.4.2.b</b> Peta Lampiran IPK	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen Izin Usaha yang dimiliki oleh PT PKP adalah IPK Pada Areal HGU untuk perkebunan kelapa sawit bukan Pada Areal yang dilepas untuk pemukiman transmigrasi

**B. PRINSIP 2** : Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu

**KRITERIA 2.1** : Kesesuaian rencana dan implementasi IPK/ILS

**7. Indikator 2.1.1.** : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
19	<b>2.1.1</b> Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan analisis verifier 1.4.1.a tentang dokumen rencana IPK/ILS ( survey potensi) maka diketahui pemegang IPK pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT PKP sesuai surat Manager Logging ( PT PKP (Hj. Rugayah SH) Nomor : 07/Mng-Log/TRK/II/2018 tanggal 03 Februari 2018 kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda dan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara tentang Permohonan Perhitungan 25 % Target untuk Pembayaran DP PSDH dan DR An. HGU PT PKP/2018 tentang Pembayaran PSDH dan DR sebesar 25% An. PT.PKP (sesuai dengan PermenLHK Nomor : P.62/Menlhk-Setjen/2015 tentang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). Terdapat Surat BPHP Wilayah XI Samarinda No. S.96/BPHP.XI-3/2018 tanggal 6 Februari 2018 yang bersifat Penting tentang Volume dan Tarif Sebagai Dasar Pembayaran PSDH dan DR sebesar 25 % An. PT PKP yang merupakan surat jawaban dari surat Manager Logging PT. PKP</p> <p>Dasar perhitungan pembayaran PSDH dan DR sebesar 25 % berasal dari Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising 100% dikalikan Faktor Eksploitasi (Fe) untuk semua sortimen (KB+KBS+KBK) berdasarkan tarif kelompok jenis kayu (Meranti dan Rimba Campuran).</p> <p>Terdapat Bukti Penerimaan Negara atau Bukti Setor/Pembayaran DR dan PSDH via Bank Mandiri sesuai dengan Surat BPHP Wilayah XI Samarinda sebagai berikut :</p>

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	11

Kode Billing	PSDH (Rp)	DR (USD)	Tgl. Bayar
82080208722902	<b>207.913.680</b>		08/02/2018
820189208723243		<b>56.700,14</b>	08/02/2018

**8. Indikator 2.1.2.** : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI																							
20	<b>2.1.2.a</b> Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan hasil analisis verifier 1.4.1.a maka diketahui bahwa potensi IPK pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT PKP yang dimohon kepada Kepala BPHP Wilayah XI Samarinda sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Blok</th> <th rowspan="2">Luas (Ha)</th> <th colspan="3">Volume Per Kelompok Jenis Kayu (M3)</th> </tr> <tr> <th>Meranti</th> <th>R Campuran</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>400</td> <td>2.111,61</td> <td>6.168,79</td> <td>8.280,40</td> </tr> <tr> <td>II</td> <td>450</td> <td>3.034,85</td> <td>6.394,68</td> <td>9.429,53</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>850</td> <td>5.146,46</td> <td>12.563,47</td> <td>17.709,93</td> </tr> </tbody> </table>	Blok	Luas (Ha)	Volume Per Kelompok Jenis Kayu (M3)			Meranti	R Campuran	Total	I	400	2.111,61	6.168,79	8.280,40	II	450	3.034,85	6.394,68	9.429,53	Total	850	5.146,46	12.563,47	17.709,93
Blok	Luas (Ha)	Volume Per Kelompok Jenis Kayu (M3)																								
		Meranti	R Campuran	Total																						
I	400	2.111,61	6.168,79	8.280,40																						
II	450	3.034,85	6.394,68	9.429,53																						
Total	850	5.146,46	12.563,47	17.709,93																						
21	<b>2.1.2.b</b> Dokumen produksi kayu (LHP)	<b>M</b>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen LHP bulan Maret 2018 pada areal HGU atas nama PT PKPL diketahui bahwa dokumen LHP tersebut dibuat oleh Ganis PHPL-PKB-R bernama <b>Abdul Halim dengan No.Reg. 00388-11/PKB-R/XXX/V/2011</b> sesuai dengan Keputusan Kementerian LHK Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. SK.111/BPHP.XI-3/2018 tanggal 28 Februari 2018 tentang Mutasi Tenaga teknis PHPL atas nama Abdul Halim dari perusahaan asal (PT. Rimba Karya Rayatama Unit II) ke perusahaan baru (PT.Persada Kencana Prima), dan SK. Manager Logging (An. Direktur PT PKP) No. 002/PKP-Mng-Log/TRK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 tentang Pengangkatan Pembuat LHP Pada PT.PKP Wlayah Kab. Tana Tidung Prov. Kalimantan Utara Tahun 2018</p>																							

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	12

			<p>Dokumen LHP pada areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT PKP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP pada bulan Maret 2018 terdapat tanda tangan Ganis PKB-R yang ditetapkan dan sesuai dengan specimen di SIM Ganis PKB-R atas nama <b>Abdul Halim dengan No.Reg. 00388-11/PKB-R/XXX/V/2011</b></p> <p>Jumlah volume kayu yangtelah di-LHP kan bulan Maret 2018 berasal dari Blok I (400 Ha) dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Blok</th> <th rowspan="2">Bulan Periode</th> <th rowspan="2">Kel. Jenis</th> <th colspan="4">Volume (M3) LHP /Sortimen</th> </tr> <tr> <th>KB</th> <th>KBS</th> <th>KBK</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">I</td> <td rowspan="2">Mar 1</td> <td>Meranti</td> <td>0</td> <td>68,73</td> <td>227,50</td> <td>296,23</td> </tr> <tr> <td>R. Camp</td> <td>179,18</td> <td>1.516,32</td> <td>441,72</td> <td>2.137,22</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">I</td> <td rowspan="2">Mar 2</td> <td>Meranti</td> <td>0</td> <td>29,34</td> <td>67,16</td> <td>96,50</td> </tr> <tr> <td>R. Camp</td> <td>32,46</td> <td>567,78</td> <td>196,32</td> <td>796,56</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Tot</td> <td rowspan="2">Maret</td> <td>Meranti</td> <td>0</td> <td>98,07</td> <td>294,66</td> <td>392,73</td> </tr> <tr> <td>R. Camp</td> <td>211,64</td> <td>2.084,10</td> <td>638,04</td> <td>2.933,78</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Grand Total</td> <td>211,64</td> <td>2.182,17</td> <td>932,70</td> <td>3.326,51</td> </tr> </tbody> </table>	Blok	Bulan Periode	Kel. Jenis	Volume (M3) LHP /Sortimen				KB	KBS	KBK	Total	I	Mar 1	Meranti	0	68,73	227,50	296,23	R. Camp	179,18	1.516,32	441,72	2.137,22	I	Mar 2	Meranti	0	29,34	67,16	96,50	R. Camp	32,46	567,78	196,32	796,56	Tot	Maret	Meranti	0	98,07	294,66	392,73	R. Camp	211,64	2.084,10	638,04	2.933,78	Grand Total			211,64	2.182,17	932,70	3.326,51
Blok	Bulan Periode	Kel. Jenis	Volume (M3) LHP /Sortimen																																																						
			KB	KBS	KBK	Total																																																			
I	Mar 1	Meranti	0	68,73	227,50	296,23																																																			
		R. Camp	179,18	1.516,32	441,72	2.137,22																																																			
I	Mar 2	Meranti	0	29,34	67,16	96,50																																																			
		R. Camp	32,46	567,78	196,32	796,56																																																			
Tot	Maret	Meranti	0	98,07	294,66	392,73																																																			
		R. Camp	211,64	2.084,10	638,04	2.933,78																																																			
Grand Total			211,64	2.182,17	932,70	3.326,51																																																			

**KRITERIA 2.2** : Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu.

**9. Indikator 2.2.1.** : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan


No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
22	<b>2.2.1.a</b> Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	<b>M</b>	Berdasarkan verifikasi dokumen SIMPONI yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan RI dan SIPNBP-SIMPONI oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada bulan Maret 2018 (SPP DR dan PSDH) maka diketahui bahwa pemegang IPK pada HGU PT PKP telah mendapatkan Rincian Tagihan DR dan PSDH (SPP) sesuai dengan LHP yang dibuat pada bulan Maret 2018 yang berasal dari Blok I (400 Ha) dengan volume LHP sebesar 3.326,51 M3. Jumlah tagihan DR dan PSDH bulan Maret 2018 yang



## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen	:	FVLK-16
Revisi	:	L
Tanggal Terbit	:	01 April 2017
Halaman	:	13


			diterima oleh PT PKP sebagai berikut :																																		
			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Blok</th> <th rowspan="2">Periode LHP</th> <th rowspan="2">Volume (M3)</th> <th colspan="2">Jumlah Tagihan (SPP)</th> </tr> <tr> <th>PSDH (Rp)</th> <th>DR (USD)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>I</td> <td>1</td> <td>2.433,45</td> <td>107.849.120</td> <td>25.907,65</td> </tr> <tr> <td>I</td> <td>2</td> <td>893,06</td> <td>39.342.840</td> <td>9.342,71</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Total</td> <td><b>3.326,51</b></td> <td><b>147.191.960</b></td> <td><b>35.250,36</b></td> </tr> </tbody> </table>	Blok	Periode LHP	Volume (M3)	Jumlah Tagihan (SPP)		PSDH (Rp)	DR (USD)	I	1	2.433,45	107.849.120	25.907,65	I	2	893,06	39.342.840	9.342,71	Total		<b>3.326,51</b>	<b>147.191.960</b>	<b>35.250,36</b>												
Blok	Periode LHP	Volume (M3)	Jumlah Tagihan (SPP)																																		
			PSDH (Rp)	DR (USD)																																	
I	1	2.433,45	107.849.120	25.907,65																																	
I	2	893,06	39.342.840	9.342,71																																	
Total		<b>3.326,51</b>	<b>147.191.960</b>	<b>35.250,36</b>																																	
23	<b>2.2.1.b</b> Bukti Setor DR dan/atau PSDH	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan verifiser 2.2.1.a maka PT Persada Kencana Prima telah melakukan <b>pembayaran lunas</b> atas tagihan DR dan PSDH sesuai dokumen LHP yang dibuat berdasarkan periode terbang dari bulan Maret 2018 (2 periode).</p> <p>Dokumen pembayaran DR dan PSDH yang dimiliki PT PKP Lestari berupa Bukti Setor via Bank Mandiri dan rincian pembayaran DR dan PSDH berdasarkan volume LHP yang diterbitkan sesuai periode terbang sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Per</th> <th colspan="2">Jumlah Tagihan (SPP)</th> <th colspan="2">Realisasi Pembayaran</th> </tr> <tr> <th>PSDH (Rp)</th> <th>DR (USD)</th> <th>Kode Billing</th> <th>Tanggal</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">1</td> <td rowspan="2">107.849.120</td> <td rowspan="2">25.907,65</td> <td>820180308191593</td> <td>09/03/2018</td> </tr> <tr> <td>820180308190111</td> <td>09/03/2018</td> </tr> <tr> <td rowspan="5">2</td> <td rowspan="5">1.632.000 29.541.960 8.167.880</td> <td rowspan="5">438,21 7.850,58 1.053,92</td> <td>820180321283467</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>820180321283327</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>820180321284255</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>820180321283433</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>820180321283256</td> <td>22/03/2018</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>147.191.960</td> <td>35.250,36</td> <td>820180321283392</td> <td>22/03/2018</td> </tr> </tbody> </table>	Per	Jumlah Tagihan (SPP)		Realisasi Pembayaran		PSDH (Rp)	DR (USD)	Kode Billing	Tanggal	1	107.849.120	25.907,65	820180308191593	09/03/2018	820180308190111	09/03/2018	2	1.632.000 29.541.960 8.167.880	438,21 7.850,58 1.053,92	820180321283467	22/03/2018	820180321283327	22/03/2018	820180321284255	22/03/2018	820180321283433	22/03/2018	820180321283256	22/03/2018	Total	147.191.960	35.250,36	820180321283392	22/03/2018
Per	Jumlah Tagihan (SPP)		Realisasi Pembayaran																																		
	PSDH (Rp)	DR (USD)	Kode Billing	Tanggal																																	
1	107.849.120	25.907,65	820180308191593	09/03/2018																																	
			820180308190111	09/03/2018																																	
2	1.632.000 29.541.960 8.167.880	438,21 7.850,58 1.053,92	820180321283467	22/03/2018																																	
			820180321283327	22/03/2018																																	
			820180321284255	22/03/2018																																	
			820180321283433	22/03/2018																																	
			820180321283256	22/03/2018																																	
Total	147.191.960	35.250,36	820180321283392	22/03/2018																																	
24	<b>2.2.1.c</b> Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH	<b>M</b>	<p>Sesuai dengan verifikasi dokumen Rincian Tagihan DR dan PSDH kepada PT PKP dan Bukti Penerimaan Negara DR dan PSDH yang diterima sebagai Bukti Pembayaran dari Kementerian LHK, maka diketahui bahwa antara dokumen tagihan dan bukti pembayaran terdapat kesesuaian dengan data LHP IPK yang dilaporkan yaitu meliputi data kelompok jenis kayu, data volume kayu (KB/KBS/KBK) serta</p>																																		

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	14

untuk kayu hutan tanaman.	tarif DR serta PSDH yang ditagihkan sesuai peraturan yang berlaku.
---------------------------	--

**10. Indikator 2.2.2.** : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
25	<b>2.2.2.a</b> FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<b>NA</b>	Alasan tidak diverifikasi : Dokumen angkutan FAKB/SHSHHK untuk KBK sudah tidak diberlakukan lagi
26	<b>2.2.2.b</b> SKSKB dan DKB untuk KB	<b>M</b>	<p>Berdasarkan verifikasi dokumen terkait SKSHHK yang diterbitkan di TPK Hutan dan di TPK Antara maka diketahui tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk penerbitan SKSHHK pada aplikasi SIPUHH Online yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terdapat SK. Direktur PT. PKP Nomor : 001/PKP-Mng-Log/TRK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 tentang Penetapan dan Penggunaan Lokasi TPN, TPK Hutan dan TPK Antara pada PT. PKP yang ditanda tanganni oleh Manager Logging (Hj. Rugayah,SH)</li> <li>2. Terdapat SK.Direktur PT PKP No.003/PKP-Mng-Log/TRK/III/2018 tanggal 03 Maret 2018 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK di TPN/TPK Hutan Pada PT PKP Wilayah Kab. Tana Tidung Prov Kalimantan Utara Tahun 2018 , yang ditanda tanganni oleh Manager Logging (Hj. Rugayah,SH) yaitu atas nama Abdul Halim (No. Reg. 00388-11/PKB-R/XXXIV/2011 yang berlaku s/d 26 Mei 2018;</li> <li>3. Terdapat SK.Direktur PT PKP No.004/ PKP-Mng-Log/TRK/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Pengangkatan P3KB di TPK Antara pada PT PKP</li> </ol>


 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	15

			<p>Wilayah Kab. Tana Tidung Prov Kalimantan Utara Tahun 2018, yang ditanda tanganni oleh Manager Logging (Hj. Rugayah,SH) yaitu atas nama Buasan (No. Reg. 02401/PKB-R/XXXIV/2018 yang berlaku s/d 12 Januari 2018;</p> <p>4. Terdapat SK.Direktur PT PKP No.005/ PKP-Mng-Log/TRK/III/2018 tanggal 10 Maret 2018 tentang Pengangkatan Penerbit SKSHHK di TPK Antara Pada PT PKP Wilayah Kab. Tana Tidung Prov Kalimantan Utara Tahun 2018 , yang ditanda tanganni oleh Manager Logging (Hj. Rugayah,SH) yaitu atas nama Abdul Halim (No. Reg. 00388-11/PKB-R/XXXIV/2011 yang berlaku s/d 26 Mei 2018.</p> <p>Jumlah dokumen SKSHHK yang digunakan untuk mengangkut kayu IPK pada HGU PT PKP bulan Maret 2018 yang diterbitkan di TPK Hutan ke TPK Antara I dan TPK Antara I ke TPK Antara II/Loading Point sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">No.</th> <th style="width: 40%;">Trayek Angkutan Kayu</th> <th style="width: 15%;">SKSHHK (set)</th> <th style="width: 35%;">Volume (M3)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>TPK Hutan ke TPK Antara I</td> <td>26</td> <td>3.326,51</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>TPK Antara I ke TPK Antara II</td> <td>6</td> <td>2.967,05</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Jumlah</td> <td>32</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Trayek Angkutan Kayu	SKSHHK (set)	Volume (M3)	1	TPK Hutan ke TPK Antara I	26	3.326,51	2	TPK Antara I ke TPK Antara II	6	2.967,05	Jumlah		32	
No.	Trayek Angkutan Kayu	SKSHHK (set)	Volume (M3)																
1	TPK Hutan ke TPK Antara I	26	3.326,51																
2	TPK Antara I ke TPK Antara II	6	2.967,05																
Jumlah		32																	

**KRITERIA 2.3** : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

**11. Indikator 2.3.1.** : Implementasi Tanda V-Legal

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
27	<b>2.3.1</b> Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	<b>NA</b>	Sesuai dengan hasil verifikasi verifier 2.2.2.b diatas bahwa PT. PKP sebagai pemegang izin usaha telah melakukan pengangkutan kayu IPK berasal dari HGU (Blok I) yang telah di LHP dan dibayar DR /PSDH nya yaitu dengan menggunakan dokumen SKSHHK dari TPK Hutan ke TPK Antara I sebanyak 26 set SKSHHK dan

 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b>  <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	16


			<p>dari TPK Antara I (Log Pond) ke TPK Antara II (Loading Poin) sebanyak 6 set SKSHHK.</p> <p>Dan terhadap dokumen SKSHHK yang digunakan tersebut telah dilakukan verifikasi dan hasilnya pada dokumen SKSHHK yang digunakan maupun ID Barcode yang terpasang di bontos kayu bulat yang telah dimuat di ponton yang berada di TPK Antara II (Loading Poin) tidak tercantum Tanda V-Legal, karena untuk persyaratan penggunaan anda V-Legal masih dalam proses penilaian /sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya.</p>
--	--	--	--

- C. PRINSIP 3** : Pemenuhan terhadap peraturan tenagakerjaan bagi IPK  
**KRITERIA 3.1** : Pemenuhan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

**12. Indikator 3.1.1.** : Prosedure dan implementasi K3

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
28	<b>3.1.1.a</b> Pedoman /prosedure K3	<b>M</b>	<p>Terdapat dokumen yang terkait prosedur K3 yang diterapkan PT. Persada Kencana Prima (PT PKP) yaitu SOP Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Npmor : SOP 001 yang telah dibuat oleh Kabag. Produksi, diketahui oleh Camp Manager dan disahkan oleh Manager Logging (Kuasa Direktur) dengan tanggal terbit 07 Januari 2018.</p> <p>Terdapat Surat Penunjukan dari Manager Logging Nomor : 18/SKPD/PKP/IV/2018 tanggal 20 April 2018 yang menunjuk Mandor Produksi (Sdr. Urif Hermawan) yang bertanggung jawab terhadap implementasi K3 di lapangan sesuai dengan SOP K3.</p>
29	<b>3.1.1.b</b> Ketersediaan peralatan K3	<b>M</b>	<p>Terdapat daftar peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi baik di lapangan, seperti sepatu boot/safety, APAR, baju pelampung dan topi safety (helm).</p> <p>Walaupun pada kenyataan di lapangan diketahui jumlah APD yang tersedia belum sesuai dengan jumlah</p>



 Trustindo Certification	<b>RESUME HASIL</b> <b>VERIFIKASI LEGALITAS KAYU</b>	No Dokumen	:	FVLK-16
		Revisi	:	L
		Tanggal Terbit	:	01 April 2017
		Halaman	:	17

			karyawan dan untuk fasilitas yang layak di Base Camp Menjelutung.
30	<b>3.1.1.c</b> Catatan kecelakaan kerja	<b>M</b>	Terdapat laporan/catatan kecelakaan kerja pada 3 (tiga) bulan terakhir yaitu Januari, Februari dan Maret 2018 yang dibuat oleh Manager Logging (Hj. Rugayah SH) dan diketahui bahwa tidak terdapat kecelakaan kerja (NIHIL). Namun upaya himbauan berupa spanduk program K3 ditempat kerja guna menekan angka kecelakaan kerja belum dilakukan oleh pihak perusahaan (PT PKP).

**KRITERIA 3.2** : Pemenuhan standar umur tenaga kerja

**13. Indikator 3.2.1.** : Tidak mempekerjakan pekerja dibawah umur (diluar ketentuan)

No.	Nomor & Judul Verifier	Nilai	RINGKASAN JUSTIFIKASI
31	<b>3.2.1</b> Pekerja yang masih dibawah umur	<b>M</b>	Sesuai dengan daftar karyawan PT PKP yang terlibat pada kegiatan IPK pada HGU bulan Maret 2018 maka diketahui jumlah karyawan yaitu 41 orang; Sesuai dengan data karyawan tersebut maka tidak terdapat pekerja /karyawan yang masih dibawah umur, dan nama karyawan termuda yaitu Agus Salim dengan tanggal lahir 02 Agustus 1997 dan masuk kerja tanggal 01 Maret 2018 berumur 20 tahun 6 bulan.

Keterangan :

M : Memenuhi

N/A : Not Applicable

TM : Tidak Memenuhi



Samarinda, 7 Mei 2018  
LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia  
Direktur